

NAUTILUS

Edisi II .Mei - Agustus 2011. www.karimunjawanationalpark.org



Salam Editorial

Rangkaian peristiwa di lokasi bekerja tak akan pernah habis untuk dituangkan disini, kemah pendidikan lingkungan konservasi yang terlaksanan pada September lalu diceritakan dari sudut pandang peserta kemah dari sebuah perguruan tinggi. Terkait dengan itu kabar yang sering terdengar tentang WTP, seorang rekan auditor dari irjen Kementerian Kehutanan membagi pengetahuannya pada edisi penutup tahun 2012 ini.

Menulis sudah merambah rekan-rekan Taman Nasional Karimunjawa, tim redaksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam pada edisi 3. Munculnya nama baru yang memberanikan diri mengirimkan tulisannya ke meja redaksi membuat edisi ini menjadi lebih berwarna. Kami tunggu semangatnya untuk tetap menulis.

(Tim Redaksi)

“Pada hakekatnya setiap manusia adalah penulis. Dan dibalik setiap kata yang diciptakan seorang penulis terdapat sebuah dunia yang menunggu untuk diceritakan. Maka, Ketika seorang penulis menuangkan pemikirannya dalam sebuah tulisan, ia tengah menggoyang dunia”.

(Emerson, 1968)

Pelindung/Pengarah :

Kepala Balai TN. Karimunjawa

Redaktur Pelaksana :

Susi Sumaryati, S.Pi, M.Eng

Editor :

Eko Susanto, S.Si, M.A., M.Ec.Dev

Reporter/Fotografer :

Hari Susanto,A.Md

Desain Grafis/Layout :

A. Batlayeri

Sekretariat:

Nur Afendi, S.Hut

Balai Taman Nasional Karimunjawa

No.ISSN : 1907 - 1175

Jl. Sinar Waluyo Raya No.248

Semarang JAWA TENGAH

UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DI KAWASAN KONSERVASI

Oleh Rohmani Sulisyati, S.Pi, M.Si *)

Perairan Indonesia kaya akan sumber daya terutama sumber daya ikan, perairan Indonesia memiliki 27,2 % dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia yang 44,7 % diantaranya adalah species ikan (Mallawa, 2006). Sumberdaya ikan terutama ikan karang konsumsi termasuk komoditas perikanan yang banyak diminta baik oleh pasar dalam negeri maupun luar negeri. Permintaan yang terus meningkat dan harga yang cukup tinggi mendorong nelayan untuk melakukan penangkapan dengan cara legal maupun illegal yang mengakibatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya tersebut terus menurun. Ditinjau dengan karakter masyarakat nelayan di sekitar kawasan konservasi pada umumnya adalah nelayan tangkap, mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam hayati laut. Bukti yang bisa dirasakan oleh masyarakat saat ini adalah semakin menurunnya hasil tangkapan ikan. Penurunan hasil tangkap lebih diakibatkan oleh penangkapan ikan yang tidak lestari, yaitu dengan pengoperasian

alat tangkap yang memiliki efektifitas daya tangkap tinggi dengan selektifitas rendah. Nilai ekonomi yang didapat oleh nelayan tidak sebanding dengan kerusakan ekologi yang ditimbulkan dari cara penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dan eksploitasi yang berlebihan. Pengelolaan sumberdaya alam perlu dilakukan dengan berorientasi ekosistem secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam baik yang bersifat ekologis, ekonomis maupun kebutuhan sosial. Adanya tekanan pemanfaatan yang berlebihan terhadap sumber daya ikan di kawasan konservasi memerlukan upaya pengelolaan yang bijaksana dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem serta aspek yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Sejalan dengan pengertian perlindungan terhadap sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Mallawa, 2006 berpendapat bahwa pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan adalah pengelolaan yang mengarah kepada bagaimana sumber daya ikan yang ada saat ini mampu memenuhi kebutuhan

sekarang dan kebutuhan generasi yang akan datang, di mana aspek keberlanjutan harus meliputi aspek ekologi, sosial-ekonomi, masyarakat dan institusi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penetapan suatu kawasan menjadi suatu kawasan konservasi karena masih mempunyai ekosistem yang alami dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Biasanya di tempat tersebut masih banyak atau bahkan hampir semua masyarakat di sekitarnya menggantungkan hidupnya dari kawasan tersebut. Disinilah letak permasalahannya, karena di dalam suatu kawasan yang menjadi kawasan konservasi memiliki konsekuensi tersendiri dalam pemanfaatan sumber daya alamnya.

Pada lingkup Kementerian Kehutanan kawasan konservasi perairan merupakan kawasan pelestarian alam yang biasanya berbentuk Taman Nasional (TN). Sementara pada lingkup Kementerian Perikanan dan Kelautan, kawasan konservasi perairan berupa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan di tingkat daerah dikenal dengan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Konsekuensi yang timbul adalah pembatasan pengelolaan baik pada kawasan Taman Nasional, KKP dan KKLD dilakukan dengan sistem zonasi. Sistem zonasi untuk kawasan Taman Nasional digunakan untuk membagi kawasan taman nasional menjadi

beberapa zona, sehingga penentuan kegiatan-kegiatan di tiap zona dapat dilakukan secara tepat dan efektif guna mencapai tujuan pengelolaan taman nasional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya (Dirjen PHKA, 2002).

Pengelolaan dengan sistem zonasi mengandung arti bahwa tidak setiap zona dalam kawasan diijinkan untuk dilakukan pemanfaatan sumber daya alam termasuk sumber daya ikan. Di dalam kawasan Taman Nasional, sesuai dengan Permenhut no. P. 56 tahun 2006 tentang penataan zonasi pemanfaatan sumber daya ikan hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatan. Zona dalam kawasan Taman Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P.56/Menhut-II/2006 terdiri dari zona inti, zona rimba atau zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan, zona pemanfaatan dan zona lain.

Walaupun sebenarnya bila dilihat secara keseluruhan zonasi yang ada, bisa dipastikan bahwa zona pemanfaatan di hampir semua Taman Nasional memiliki wilayah yang paling luas, namun biasanya yang menjadi sumber persoalan masyarakat setempat adalah adanya penetapan zona inti dan zona perlindungan sebagai zona larang tangkap yang sebenarnya hanya merupakan sebagian kecil saja dari total keseluruhan kawasan. Masyarakat berfikir zonasi yang ada merugikan

mereka dalam mencari ikan, banyak tempat-tempat yang merupakan sumber ikan telah dijadikan zona inti atau zona perlindungan (WCS, 2009).

Nababan et al., 2010 menyebutkan ancaman terbesar bagi keberlangsungan sumber daya ikan karang adalah kegiatan pemanfaatan yang besar-besaran dan tidak ramah lingkungan oleh manusia. Penangkapan yang melewati batas (*over fishing*) dari kemampuan ikan untuk pulih dan penangkapan yang merusak (*destructive fishing*) menjadi faktor utama degradasi kelimpahan ikan karang. Cara tangkap yang merusak seperti jaring muroami dan cantrang, racun, dan bahan peledak menjadi faktor utama kerusakan habitat ikan karang. Potassium sianida merupakan barang yang umum bagi nelayan ikan hias di Indonesia. Penggunaan potassium sianida dalam menangkap ikan menyebabkan karang yang menjadi habitat ikan hancur dan kualitas ikan karang menurun karena ikan yang ditangkap hidupnya tidak bertahan lama. Bahan peledak menciptakan kerusakan ekosistem terumbu karang sangat cepat. Alcalá dan Gomez, 1979 dalam Nababan et al (2010) memperkirakan, karang membutuhkan waktu 37 tahun untuk mencapai kondisi setengah pulih setelah hancur akibat ledakan.

Kunci keberhasilan penerapan

manajemen dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan yang berkesinambungan terletak pada dukungan dari masyarakat sebagai pelaku utama. Tanpa dukungan dari masyarakat, proses-proses pengelolaan sumberdaya ikan tidak akan memberikan perubahan yang berarti. Kegagalan pengelolaan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat nelayan. Kerugian terbesar bagi masyarakat adalah berkurangnya stok ikan yang mengarahkan kepada hilangnya rantai nilai ekonomi sumberdaya ikan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama (Marnane dkk., 2003).

Oleh karena itu dalam upaya perlindungan terhadap sumber daya ikan diperlukan suatu pendekatan yang menurut Mallowa, 2006 tidak bisa terlepas dari tujuan sosial, ekologi, ekonomi dan kelembagaan. Upaya perlindungan sumber daya ikan dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. Pengaturan terhadap alat tangkap. Pengaturan alat tangkap memberikan pengaruh besar terhadap matapencaharian nelayan karena diyakini dapat meningkatkan stok ikan (Marnane dkk., 2004). Pengaturan alat tangkap bisa berupa pengaturan jenis alat tangkap tertentu yang

sesuai dengan kondisi setempat atau pengaturan tentang ukuran mata jaring, ukuran mata jaring yg termasuk kecil (<1.5 inci) juga berperan dalam menguras berbagai spesies ikan, termasuk sejumlah besar juvenil ikan. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya stok ikan dengan sangat cepat (Marnane dkk., 2004). Selain itu diperlukan juga pengaturan cara penangkapan ikan, seperti praktek penangkapan ikan dengan alat ini menggunakan kompresor tambal ban, untuk menangkap lobster, teripang dan ikan hidup. Bila dilihat dari sisi kesehatan akan sangat berbahaya bagi p e n y e l a m y a n g menggunakannya, namun dengan alasan praktis dan murah (bila dibandingkan dengan harga tabung SCUBA) kegiatan penangkapan ikan seperti ini banyak dilakukan.

2. Penerapan lokasi open close (sistem buka tutup) secara periodik pada waktu-waktu tertentu dengan lebih menekankan pada lokasi-lokasi penting seperti daerah pemijahan ikan untuk memberikan kesempatan ikan bereproduksi, guna

pemanfaatan yang lestari dan berkesinambungan. Kerentanan lokasi pemijahan terhadap tekanan perikanan dan mendesaknya kebutuhan untuk melindungi fase yang rentan dalam siklus hidup ikan karang yang bernilai penting (Sadovy dan Domier, 2000). Diperlukan suatu pengawasan yang lebih ketat terutama di lokasi pada saat terjadinya pemijahan.

Namun disisi lain penutupan beberapa daerah penangkapan ikan dalam kawasan taman nasional memaksa mereka untuk menempuh jarak yang lebih jauh untuk memperoleh jumlah tangkapan yang sama, dan hal ini berpengaruh terhadap biaya produksi per trip penangkapan (Wibowo, 2005). Bagi sebagian nelayan sistem pengaturan penutupan lokasi penangkapan ikan diyakini akan memberikan dampak negatif bagi penghasilan karena berkurangnya daerah penangkapan.

3. Pengelolaan oleh masyarakat, sudah saatnya masyarakat lokal ikut serta dalam tiap bentuk aktifitas pengelolaan untuk mengelola sumberdaya mereka sendiri. Masyarakat harus bisa

memanfaatkan kesempatan dimana pilihan bentuk-bentuk pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan telah tersedia untuk mereka. Lembaga-lembaga terkait yang ada harus berusaha lebih intensif untuk membantu koordinasi dan fasilitasi upaya-upaya masyarakat dalam membatasi serbuan dan rayuan dari eksportir dan pedagang-pedagang besar ikan hidup untuk mengeksploitasi sumberdaya ikan karang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi permintaan pasar di tingkat regional. Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah mesti menyusun dan menetapkan peraturan perikanan yang membatasi eksploitasi di kawasan perikanan terumbu karang dan tidak menetapkan peraturan yang justru mendukung upaya eksploitasi sumberdaya ikan karang sebanyak-banyaknya yang justru menyulitkan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya mereka di masa depan (Mukminin dkk., 2006). Wujud nyata partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sehingga dapat

merubah sudut pandang dalam pengelolaan sumberdaya alam dari government based management menuju pengelolaan yang melibatkan semua pihak terkait (Marnane dkk., 2004). Sementara Nikijuluw, 1994 dalam Mallawa, 2006 menjelaskan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat (Community Based Management, CBM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya

Secara global pengelolaan sumber daya ikan dituangkan sebagai World Conservational Strategy yang telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 1988 merupakan suatu strategi pengelolaan terumbu karang dan telah menjadi prioritas dunia yang dikenal dengan lima pendekatan dasar pengelolaan konservasi yang terdiri atas:

1. Zonasi, pembagian zona-zona tertentu sesuai peruntukannya
2. Penutupan Secara Periodik (Periodic Closure)
3. Pembatasan Hasil (Yield Constraints) bisa berupa memonitor hasil dan pelarangan

penangkapan setelah beberapa tangkapan telah didapat atau membatasi jumlah individu atau jumlah dan kapasitas kapal yang diperbolehkan menangkap di area yang dimaksud.

4. Pembatasan Peralatan (Equipment Constraints) berupa pelarangan bahan peledak, racun dan teknik penangkapan dan panen lainnya yang dapat merusak fisik terumbu karang serta penentuan ukuran mata jaring yang memungkinkan ikan-ikan kecil tumbuh sampai umur siap mijah dan pelarangan penggunaan jangkar dengan design tertentu yang sangat merusak.
5. Pengurangan dampak (Impact Limitations) berupa penentuan batasan bahan pencemar yang diperbolehkan dan penentuan jumlah penyelam, reef-walkers, jumlah kapal ukuran kecil diperbolehkan.

Upaya perlindungan terhadap sumberdaya ikan di kawasan konservasi perlu dilakukan dengan berorientasi ekosistem secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam baik yang bersifat ekologis, ekonomis maupun kebutuhan sosial. Adapun upaya yang

mungkin dilakukan antara lain dengan: pengaturan terhadap alat tangkap yang digunakan termasuk cara penangkapannya, pengaturan lokasi buka tutup dan pengelolaan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mallawa, A.; 2006; *Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*; Paper Disajikan pada Lokakarya Agenda Penelitian Program COREMAP II Kabupaten Selayar, 9-10 September 2006
- Marnane, M.j., R.L.Ardiwijaya, J.T. Wibowo, S.T.Pardede, A. Mukminin, & Y. Herdiana. 2003. *Studi perikanan mouro-ami Kepulauan Karimunjawa 2003*. Balai Taman Nasional Karimunjawa & Wildlife Conservation Society: 31 hlm
- Mukminin, A. T. Kartawijaya, Y. Herdiana, I. Yulianto. 2006. *Laporan Monitoring Kajian Pola Pemanfaatan Perikanan di Karimunjawa (2003-2005)*. Wildlife Conservation Society-Marine Program Indonesia. Bogor, Indonesia. 35 pp.
- Nababan, M.G., Munasik, I. Yulianto, T. Kartawijaya, R. Prasetya, R.L. Ardiwijaya, S.T. Pardede, R. Sulisyati, Mulyadi, Y. Syaifudin. 2010. *Status Ekosistem di Taman Nasional Karimunjawa: 2010*. Wildlife Conservation Society-Indonesia Program. Bogor. xi + 78 hlm.
- Wibowo, J.T. 2006. *Laporan Monitoring: Aspek Sosial Pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa, 2005*. Wildlife Conservation Society-Marine Program Indonesia. Bogor. Indonesia.

*)PEH TN Karimunjawa yang saat ini sedang melaksanakan tugas belajar jenjang Doktor di Universitas Gadjah Mada

Sepengetahuanku konsep RBM (dibaca: pengelolaan berbasis resort) lahir dari pemikiran seseorang bahwa kecacauan dalam pengelolaan kawasan konservasi berasal dari jarangnyanya petugas lapangan berada di tempat tugasnya. Akibatnya fungsi pengawasan kawasan tidak berjalan kontinyu. Dampaknya adalah para pelaku pelanggaran dengan leluasa keluar masuk kawasan. Selain itu, sebagian data-data lapangan juga hanya memakai metode praduga dan kira-kira di atas meja tanpa didasarkan pada kondisi sebenarnya di lapangan. Aku sendiri melihat langsung mengenai penggunaan metode kira-kira di atas meja ini pada era 2000 sampai 2006 di kantor seksi. Upayaku untuk merubahnya sungguh susah karena tidak ada mekanisme kontrol yang jelas dan *reward and punishment*. Akibat lanjutannya adalah informasi yang digunakan untuk perencanaan dan kebijakan pengelolaan kawasan menjadi salah arah atau hanya sepenggal saja sehingga tidak mengarah pada pengelolaan yang berkelanjutan.

Namun jika kita hanya melihat dari sisi staf lapangan saja, rasanya tidak adil. Menurutku apa yang

disampaikan mas Agus dari TN Alas Purwo, yang menyatakan bahwa pimpinan merupakan aktor utama dalam keberhasilan pengelolaan kawasan melalui kebijakannya yang pro lapangan, adalah seratus persen benar. Tapi aku juga menambahkan bahwa bukan hanya satu faktor pimpinan saja yang mempengaruhi, kekompakan staf yang mau bekerja dengan benar juga merupakan faktor kedua yang tidak bisa dianggap enteng. Jika staf kompak dalam hal kebaikan maka siapapun pimpinannya mau tidak mau akan mengikuti meski mungkin dengan proses dan waktu yang agak lama. Dan akan lebih cepat beradaptasi jika pimpinannya memahami kebaikan dari konsep RBM ini.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, maka aku sepakat dengan sistem RBM, meski sedikit banyak pola itu mengacu pada pola RPH (Resort Pengelolaah Hutan) yang ada di Perhutani. Sisi baik yang dikembangkan dari sistem RBM adalah membagi habis satu kawasan konservasi menjadi resort-resort dengan luasan yang lebih kecil dari tingkat seksi. Kemudian membagi habis staf lapangan dan menempatkannya di resort. Dengan lebih dekat ke lapangan, maka kesempatan untuk melakukan

pelanggaran makin sempit. Itu terbukti dari pengakuan staf Resort Parang yang menyatakan bahwa selama ada petugas di resort tersebut, informasi intelijen yang menyebutkan adanya pelanggaran di zona inti menjadi tidak terbukti. Hal itu terjadi karena setiap ada petugas datang pasti diketahui oleh pelaku yang tinggal di pulau tersebut dan selanjutnya membuat mereka tidak melakukan aktivitas selama staf lapangan itu ada di kantornya.

Selain itu, data dari lapangan yang semula hanya dicatat jika sempat saja di buku kerjanya, dengan RBM melalui blanko register (baca: *tally sheet*) maka catatan tersebut makin terstruktur. Yang membuat sistem ini seakan-akan menjadi solusi jalan tengah (pinjam istilahnya Pak Wir) yang mengagumkan (menurut aku) adalah:

1. Staf lapangan dapat mencatat apa yang seharusnya dicatat dengan mengisi kolom-kolom dalam blanko register, lengkap dengan lokasi GPS dan fotonya.
2. Pengisian blanko register dapat dijadikan penilaian kinerja staf lapangan secara adil, karena kebenaran datanya telah diverifikasi oleh Kepala Resortnya serta divalidasi oleh validator di seksi.

3. Menjamin berjalannya mekanisme *reward and punishment* melalui penyusunan angka kredit yang berdasarkan pengisian blanko register tersebut.
4. Pimpinan juga dapat mengetahui kinerja staf lapangan dan Kepala Resortnya dengan melihat posisi GPS (hasil pengisian blanko register) yang melalui aplikasi SIM-RBM TNKJ dapat diketahui lokasi mana saja yang sering atau jarang dijamah.

Semua itu dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada komitmen dari semua pihak, baik pimpinan dan stafnya. Dan akan lebih baik lagi apabila kebijakannya pro lapangan. Hal itu dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya:

1. Adanya percepatan penyediaan sarana prasarana di tingkat resort. Bagaimanapun juga, resort ada di antara mulut harimau (pimpinan dan masyarakat). Oleh karenanya sarana prasarana penunjang tupoksi harus dilengkapi, termasuk kepada masyarakat. Untuk mereka dapat berupa program bantuan modal, alat kerja/produksi, penguatan kelembagaan, dan sebagainya.
2. Staf lapangan yang lokasinya jauh dari peradaban, hendaknya dapat

didekatkan melalui pemilihan lokasi kantor resort yang dekat dengan masyarakat, sehingga jaminan kebutuhan hidup di lapangan (logistik, informasi, dan komunikasi) dapat dipenuhi dengan mudah. Selain itu, kedekatan dengan masyarakat dapat mempermudah komunikasi dan pengawasan karena semua jenis gangguan kawasan sumbernya adalah manusia yang ada di sekitar kawasan tersebut.

3. Lokasi resort yang kebanyakan di daerah terpencil tentunya memiliki standar harga yang lebih mahal daripada di kota. Untuk itu biaya operasional untuk melaksanakan tupoksinya juga harus dijamin. Jangan pernah berpikiran bahwa gaji yang diberikan per bulan adalah biaya yang digunakan untuk keliling wilayah kerja. Gaji adalah upah yang mestinya diberikan untuk menghidupi keluarganya. Oleh sebab itu, biaya operasional yang timbul akibat kegiatan di lapangan harusnya dijamin penuh.
4. Peningkatan kapasitas SDM di lapangan melalui pelatihan, studi banding, pembinaan di lokasi, dan kegiatan sejenis lainnya yang sesuai

dengan kebutuhan dan potensi kawasan resortnya. Kegiatan ini akan membuka ide-ide baru bagi staf lapangan dalam mengelola kawasannya.

Melihat itu semua, aku berpikir bahwa sejak dulu TNKJ sebenarnya sudah melaksanakan konsep RBM meski belum menyeluruh. Dengan adanya konsep tersebut makin menyempurnakan pengelolaan kawasan TNKJ. Bahkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, sampai monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh staf lapangan sendiri. Aku akui memang belum semua staf memahami semuanya, sebagian masih separo-separo dalam memahami konsep ini. Untuk itulah peranan *middle* manajer dalam melakukan pembinaan kepada bawahannya, selain didukung oleh Tim Kerja RBM.

Dari pengalaman ini, aku dapat mengambil pelajaran berharga. Pertama, dukungan pimpinan terhadap pengelolaan kawasan yang berkelanjutan secara benar merupakan faktor penting. Kedua, pemahaman dan komitmen staf terhadap pelaksanaan sistem ini juga menjadi faktor kunci. Ketiga, adanya Tim Kerja yang mau bekerja keras guna meletakkan pondasi yang kuat

POLAH TINGKAH SEORANG POLHUT

(penyusunan konsep RBM, perencanaan dan tahapan pelaksanaan RBM, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RBM, serta penyusunan pedomannya) bagi terwujudnya sistem RBM, juga menjadi faktor penentu. Kenapa? Karena sistem RBM belum didukung oleh pedoman/juknis yang memadai dari Kemenhut. Akibatnya pelaksanaan di masing-masing UPT dapat berbeda-beda. Namun bagiku adalah yang penting efektifitas pengelolaan kawasan, keberpihakan pelaksanaan tupoksi staf lapangan, dan akurasi data dapat berjalan baik.

Harapanku ke depan adalah sistem ini makin sempurna dalam hal dasar hukum yang komprehensif serta dasar hukum penganggarannya, sehingga sistem ini dapat menjadi *decision support system* bagi pimpinan UPT / Pusat melalui SIM-RBM dan konsep *Situation Room*-nya. Dengan demikian kebijakan pengelolaan kawasannya dapat lebih tepat, efektif, dan mencapai indikator kinerjanya. Dan lebih jauh lagi adalah staf lapangan dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik, nyaman, dan berkeadilan. Tentunya semua demi meningkatnya kesejahteraan, baik bagi pengelola kawasan, masyarakat sekitar kawasan, maupun “kesejahteraan” bagi potensi

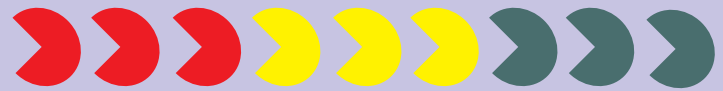
konservasi di kepulauan terpencil sekaligus menjadi guru di SMP untuk mengajar pendidikan lingkungan. Kegiatan itu dilakukannya selama 6 tahun lebih. Wah pas dengan penjelasan dia mengenai senjata, gumamku. Lalu dia cerita bahwa di tempatnya kerja tidak hanya patroli hutan, tapi juga patroli laut, yang jika kondisi badan tidak fit, dapat dipastikan mabuk berat. Wah yang ini juga pas dengan penjelasannya dulu, kata batinku. Namun suatu saat dia bercerita tentang gawatnya suasana saat menghadapi demo satu kampung karena penangkapan pelaku potasium, panasnya suasana ketika harus menangkap pelaku *illegal fishing* yang memiliki ABK banyak, gemesnya tangan dia ketika akan berkelahi dengan tokoh masyarakat yang berbuat anarkis terhadap fasilitas negara, dan seabrek cerita mengenai perdebatan dan ancaman. “Walah, apa enakya kalo gitu?”, tanyaku. Dengan rileks dia menjawab bahwa apa yang dikerjakan adalah demi kesejahteraan manusia dan kelestarian alam serta menjauhkan dari sifat keserakahan. Wow.....

Mungkin dia lagi beruntung kali ya, karena tahun 2007 dia mendapat beasiswa dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk sekolah S-2 di UGM dan Takushoku Tokyo di Jepang. Wah, itu

diluar bayangku, dia bisa keluar negeri. Sepulang sekolah, dia memiliki pemikiran yang lebih “luas” dari sebelumnya, baik dari konsep hubungan manusia (sosiologi), konsep kerja yang terencana dan terstruktur. Apalagi thesisnya membahas mengenai evaluasi program pemberdayaan. Mungkin karena itulah dia sekarang diberi tugas tambahan sebagai staf perencanaan. Yang jelas bagiku, dia tambah pikun, hahahaha. Habis banyak lupanya daripada ingatnya. Sampai-sampai dia lupa tanggal lahir anaknya, lupa ulang tahun perkawinannya, dan yang parah lupa ikut apel pagi. Aku tertawa jika dia menceritakan itu semua. Wah, berat... Apakah karena banyaknya tugas perbantuan di luar bidang Polhut yang membuatnya begitu. Entahlah.

Aku jadi berpikir, dia itu masuk pegawai sebagai Polhut, tapi tapi kenyataannya sekarang lebih banyak ngurusin hal-hal diluar Polhut. Bahkan ngurusin tiket karcis, pengelolaan berbasis resort, perencanaan dan penganggaran, dan banyak lagi. Kok bisa ya, pikirku. Apa itu disebut profesional? Entahlah. Polah tingkah Polhut satu itu memang diluar bayanganku tentang profil Polhut. Yang jelas dia meyakinkan aku bahwa apa yang dia kerjakan adalah demi institusi. Dia berangan-angan

bahwa institusi tempat dia bekerja memiliki sistem kerja yang baik, yang dapat membuat siapa pun yang bekerja disitu dapat bekerja dengan baik, patuh pada pedoman yang ada, serta jujur. Wow....*awesome* banget, batin aku. Semoga apa yang ditugaskan ke dia dapat dikerjakan dengan baik dan jujur, itu aja doaku ke dia.



Alhamdulillah, itu ucapan dari teman-teman PEH dan Polhut dilapangan, ketika tahu alat-alat selam yang selama ini diharapkan akhirnya terlaksana juga. Hal ini tentunya akan menjadi semangat baru bagi teman-teman dengan diadakannya peralatan selam yang baru. Balai Taman Nasional Karimunjawa sejak tahun 2000 sudah memiliki peralatan selam yang komplit sepertinya kami saat itu jadi satu-satunya instansi yang memiliki alat selam di Karimunjawa. Waktu itu kami memiliki 10 set SCUBA untuk mendukung tupoksi kami dalam upaya konservasi kawasan laut. Dengan kawasan perairan seluas lebih dari 110.000 Ha, aktifitas kami antara lain meliputi: Inventarisasi Terumbu Karang, Inventarisasi Ikan Karang, Rehabilitasi Terumbu Karang, Monitoring Sebaran Kima. Penggunaan alat selam tidak terbatas hanya pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, diluar itu

kami sering kali berlatih untuk menambah jam selam dan sertifikasi.

Intensitas pemakaian alat selam kami yang tinggi dan faktor usia alat selam berdampak pada menurunnya kualitas alat seperti tabung, **Buoyancy Control Device (BCD)**, **coral boot**, **fins**, **wetsuit**. Hal itu sangat berpengaruh pada keselamatan penyelam. *Safety first*, kata yang sering terdengar untuk mengingatkan pentingnya keselamatan dalam bekerja, menjadi pertimbangan utama dalam peremajaan alat selam. Tahun 2011, ketika kami menyusun rencana penyusunan DIPA BA 2012, kami mengusulkan pengadaan alat SCUBA kegiatan untuk tahun 2012 dalam rencana penyusunan DIPA BA 29 Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan menganggarkan pengadaan alat SCUBA sejumlah 16 set.

Seiring dengan berjalannya proses DIPA 29 Balai TN. Karimunjawa

tahun 2012 terus berjalan. Pada bulan Oktober 2012 ini, pengadaan alat selam tersebut terealisasi. Adapun secara rinci alat selam ini adalah sebagai berikut ;

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	Alat Selam Set (AQUA LUNG)	16 unit
2.	Kompresor (BAUER JUNIOR II)	2 Unit
3.	Life Jacket (ELKAMINO)	20 Unit

Proses pengadaan kami lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengujian terhadap mutu dan fungsi dari peralatan tersebut telah dilakukan oleh instruktur selam dan penyelam bersertifikat. Dengan peralatan yang baru ini petugas di lapangan dapat melaksanakan penyelaman yang dengan aman dan nyaman. Aktifitas penyelaman dapat berjalan lancar dengan hasil yang merefleksikan sumber daya alam Karimunjawa yang asli dan terjaga keutuhannya.



GARA-GARA BAMBANGAN

Oleh Susmiati, S.Hut



“Nek manuke mabur ping satus opo yo kowe meh takon ping satus juga!” seru Pak Hary setengah bersengut saat aku bertanya lagi untuk kesekian kalinya pada jenis yang ternyata sama. Kalimatnya cukup keras dan sedikit terasa pedas di kuping bagi seorang pengamat burung pemula sepertiku yang nyaris tidak mengenal dunia aves sebelumnya. “Kalau mau pengamatan baca dulu *field guide* nya, kenali jenis burungnya, cara makannya, cara terbangnya, warna bulunya, warna kakinya, warna ekornya, habitatnya,” jelas Pak Hary sembari tak sedikitpun bergeming dari posisi menatap lensa monokulernya. Aku yang sedang diomeli hanya bisa terpaku, menelan omelan sang guru galak, menatap punggungnya sekilas, melirik Pak Kuswadi disampingku, kemudian perlahan beralih ke buku burung Karimunjawa di tangan kiriku.

“Itu Bambangan kuning!”, jawaban Pak Hary sewaktu aku bertanya tentang jenis burung yang baru saja terbang melintas di depan kami yang ternyata adalah bambangan kuning yang beberapa menit sebelumnya telah aku tanyakan jenisnya sewaktu aku

melihat si burung di balik lensa binokulerku. Aku tidak menyadari kalau burung yang terbang barusan adalah jenis yang sama. selain karena aku belum pernah mengenal sebelumnya aku juga sedang mengalihkan lensa binokulerku ke tempat berbeda agar bisa menemukan jenis burung lain yang bisa ku amati. Meski ku tahu pasti menemukannyapun tetap akan membuatku bertanya, “Pak Hary, burung apa itu?” lagi, dan lagi..

Karimunjawa sebagai kawasan pelestarian alam dengan berbagai ekosistem lahan basah seperti pantai, mangrove dan padang lamun serta posisi geografis di tengah Laut Jawa memiliki nilai penting bagi kehidupan berbagai satwa. Kondisi tersebut memungkinkan bagi burung migran yang melakukan perjalanan jauh antar negara bahkan antar benua singgah di kepulauan Karimunjawa. Lebih lanjut pak hary menjelaskan padaku bahwasanya burung migran yang singgah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu: 1) Burung air migran (*migratory waterbirds*) jenis yang termasuk diantaranya adalah jenis burung pantai

(shorebirds) yaitu Kedidi, Trinil, Terik, Gajahan, Cerek dan burung air lainnya seperti Kuntul Cina, Bambangan Kuning dll., 2) Burung pemangsa migran (*migratory raptors*) seperti Elang-alap Nipon, Sikep-madu Asia serta 3). Burung migran lainnya seperti Kirik-kirik dan burung layang-layang. Dan sebagian besar burung air pendatang di Indonesia di dominasi oleh burung pantai. Dan satu hal yang pasti, penjelasan pak hary itu membuatku makin bingung...lha wong baru mencoba kenal bambangan kuning aja udah kena semprot..malah itu banyak banget nama burung yang disebut.

Di Taman Nasional Karimunjawa sendiri berdasarkan laporan kegiatan identifikasi burung migran yang pernah dilakukan di tahun 2010 tercatat sebanyak 18 jenis burung migran, yang terbagi dalam burung air migran 13 jenis, raptor migran 1 jenis, dan burung migran lainnya 4 jenis. Pada bulan Oktober 2010 pengamatan yang dilakukan di sekitar Terusan berhasil mengidentifikasi 10 jenis burung pantai migran, salah satunya adalah Trinil bedaran *Xenus cinereus* dengan tanda bendera warna hitam putih di kaki si burung yang menandakan ia telah ditandai di Pulau Chongming, Shanghai, China. Hmm..hebat ya si bedaran bisa terbang sejauh itu,

kurang lebih sejauh 4,320 km...

Perjalanan pengamatan burung hari berikutnya di Terusan, Cikmas dan Pulau Burung. Disinilah aku bisa melihat beberapa jenis burung dan masih bisa mengingat namanya, tentu saja aku tidak serta merta tahu..tetep aja nanya dulu dan nyontek buku. Gajahan Pengala *Numenius phaeopus* dengan ciri khas paruhnya yang panjang melengkung ke bawah 1,5 sampai 2 kali panjang kepalanya itu rasanya membuatku tak mudah melupakannya. Jenis ini merupakan salah satu burung migran yang dilindungi oleh perundang-undangan di Indonesia. Burung berikutnya yang tertangkap lensa



binokulerku adalah Trinil Ekor-kelabu *Heteroscelus brevipes*. Sesuai dengan namanya, tubuh bagian atas, sayap, dada dan ekornya berwarna abu-abu. Merupakan salah satu burung pantai yang umum di Karimunjawa terutama terusan. Burung ini lebih menyukai pantai

berpasir/pasang surut seperti di terusan dan Pulau menjangan Besar. Senada dengan Gajahan Pengala, Itik Benjut *Anas gibberifrons* juga membuatku tak mudah melupakannya karena dahinya yang menonjol. Burung ini memiliki jumlah dan penyebaran yang lebih luas di Karimunjawa, di Sawah Cikmas bahkan pernah tercatat berkumpul dalam jumlah hingga 40 ekor. Dan beberapa jenis burung yang sempat teramati lensa binokulerku diantaranya adalah Cangk abu *Ardea cinerea*, Cerek kernyut *pluvialis fulva*, Cangk merah *Ardea purpurea*, Cekakak sungai *Halcyon chloris*, Pergam Laut *Ducula bicolor*, Kekep Babi *Artamus leucorhynchus*, Bambangan Kuning *Ixobrychus sinensis*, juga Elanglaut Perut-Putih *Haliaeetus leucogaster*. Tentu saja yang berhasil aku lihat itu tidak semuanya jenis burung migran loh, aku harus nyontek lagi untuk memastikan dugaanku.

Dari 21 jenis burung migran yang berhasil kujumpai selama pengamatan adalah Cikalang kecil *Fregata ariel*, Bambangan Kuning *Ixobrychus sinensis*, Sikep Madu Asia *Pernis ptilorhynchus*, Cerek Besar *Pluvialis squatarola*, Cerek Kernyut *Pluvialis fulva*, Cerek Pasir Besar *Charadrius leschenaultii*, Gajahan Pengala *Numenius phaeopus*, Trinil Kaki

Merah *Tringa totanus*, Trinil Semak *Tringa glareola*, Trinil Pantai *Actitis hypoleucos/Tringa hypoleucos*, Trinil Ekor Kelabu *Tringa brevipes*, Kedidi Leher Merah *Calidris ruficollis*, Kedidi Golgol *Calidris ferruginea*, Terik Asia *Sterna glareola maldivarum*, Dara Laut Biasa *Sterna hirundo*, Dara-laut Sayap Putih *Chlidonias leucopterus*, Cekakak Suci *Halcyon sancta*, Kirik-kirik Laut *Merops philippinus*, layang-Layang Api *Hirundo rustica*, Sikatan Sisi Gelap *Muscicapa sibirica* dan Kicuit Batu

Motacilla cinerea.

Selama pengamatan aku menjadi guyonan teman-teman tim burung migran karena ketidaktahuanku. Anehnya aku merasa senang bisa menjadi bagian dari tim pengamat burung menjelajah Karimunjawa dari satu pulau ke pulau lainnya demi mendapati kepek sayap Bambang yang melintas, *Sterna hirundo* yang sedang

mengembara dan singgah di Karimunjawa...,atau bahkan sekedar mendengarkan kicauan burung yang selaras dengan nyanyian alam di sekelilingku. Yaa..ternyata aku gak hanya pengamat pemula tapi aku juga gak ngerti apa-apa, meskipun begitu bisa mengenal beberapa jenis burung dan tingkahnya mampu membuatku merasa *happy*.



CATATAN DARI KEMAH PENDIDIKAN LINGKUNGAN KONSERVASI *)

(Mahasiswa Minat Konservasi Sumberdaya Hutan angkatan 2010 – Koordinator KP3 Wetland)

Karimunjawa, Balai Taman Nasional Karimunjawa mengadakan Kemah Pendidikan Lingkungan Konservasi yang dilaksanakan selama tiga hari yaitu, 8–10 September 2012. Kemah ini diikuti oleh beberapa delegasi dari perguruan tinggi dan sekolah Menengah yaitu UGM (KP3), UNY (Bionic), UNDIP (Haliaster, Wapeala, KSP), UNNES (Green Comunity, Pelatuk), UNS (Kompos, Gova) MA NU Karimunjawa, dan SMK Karimunjawa. Masing-masing kelompok delegasi terdiri dari tiga mahasiswa. Kelompok Pengamat, Peneliti dan Pemerhati (KP3) mengirimkan Mohamad Khomarudin (KSDH'10), Anaas Desiana Muttaqin (KSDH'10), dan Bahtera Ardi (GF'11). Kemah ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta alam dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang ada di Taman Nasional Karimunjawa.

Balai Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai Cagar Alam Laut (CAL)

pada tanggal 9 April 1986 melalui SK Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999 seluas 111,625 ha (TN Karimunjawa, 2011). Sesuai dengan ketentuan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, TN Karimunjawa memiliki fungsi sebagai kawasan konservasi yaitu sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Beberapa kegiatan selama kemah ini berlangsung, diantaranya pengenalan ekosistem dan berbagai program konservasi yang terdapat di Taman Nasional Karimunjawa. Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Pulau Karimunjawa dan Pulau Menjangan Besar. Untuk lokasi berkemah terdapat di Pulau Karimunjawa tepatnya di perkemahan Legon Lele. Di Pulau Karimunjawa dilakukan kegiatan

traking yang melalui berbagai tipe ekosistem hutan, yaitu meliputi hutan hujan tropis dataran rendah, hutan pantai dan Hutan Mangrove. Di hutan hujan dataran rendah traking dilakukan sepanjang 5 km di jalur patroli. Dalam traking ini terdapat lima pos yang diisi dengan permainan dan uji pengetahuan umum tentang konservasi.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengamatan vegetasi dan satwa yang dijumpai saat melakukan traking. Jalur traking relatif terjal, sebagian jalur berupa tutupan batuan kapur dengan kemiringan sampai 60% pada elevasi sampai 84 m. Traking di jalur hutan pantai relatif singkat. Pada lokasi ini memang digunakan untuk istirahat dan makan siang. Pemandangan di hutan pantai ini menyuguhkan panorama yang menakjubkan. Semilir angin dan kicauan burung pantai menambah asrinya suasana.

Terdapat jalur traking khusus yang disediakan di hutan mangrove. Jalur traking ini panjangnya kurang

lebih 1,5 km, sehingga peserta dapat dengan leluasa melakukan pengamatan ekosistem mangrove. Di jalur traking mangrove ini juga terdapat suatu ruangan untuk kegiatan diskusi. Selain itu juga terdapat pos pengamatan untuk pengamatan burung. Jika beruntung kita juga bisa menikmati indahnya sun set sari atas pos pengamatan ini. Pada lokasi ini terdapat spesies endemik yang hanya di temukan di karimunjawa yaitu *Sciphyphora hydrophylaceae*. Tanaman ini memiliki ciri-ciri daun tebal, bentuk daun bulat telur terbalik, memiliki cabang banyak, duduk daun tersebar, dan memiliki akar jangkar.

Kegiatan di Pulau Menjangan Besar dilakukan pada hari kedua. Di pulau ini dilakukan berbagai kegiatan diantaranya pengenalan konservasi penyu, aksi bersih-bersih di garis pantai yang telah ditentukan dan juga pengamatan ekosistem terumbu karang. Beberapa teknik konservasi penyu diantaranya adalah dengan penetasan dan pelepasan penyu. Penetasan penyu dilakukan dengan memperhatikan suhu dan kelembaban lingkungan sekitar. Oleh sebab itu dalam teknik penetasan ini pasir yang digunakan untuk menyelubungi telur

berasal dari pasir dimana telur tersebut ditemukan. Pada prinsipnya dalam pembesaran penyu ini dibedakan menjadi tiga, yaitu pembesaran alami, pembesaran buatan dan semi alami. Pembesaran yang dilakukan di Taman Nasional Karimunjawa tergolong pembesaran semi alami, karena dalam pembesarannya dikombinasikan dengan beberapa perlakuan dan manipulasi.

Ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Karimunjawa tergolong baik dan belum banyak mengalami kerusakan. Terumbu karang terbentuk kompak di dasar laut, nampak beragam saling menghiasi panorama bawah laut. Biota laut yang terdapat di dalamnya pun tampak beragam dan menawan. Dari permukaan yang dangkal pun terlihat berbagai biota laut yang mengindikasikan keanekaragaman hayati di perairan cukup tinggi dan juga sebagai indikator ekosistem yang kompak.

Kegiatan terakhir dari kemah pendidikan lingkungan konservasi ini adalah pembersihan sampah di garis pantai yang telah ditentukan. Dalam pengambilan sampah ini dibedakan

antara sampah organik dan anorganik. Untuk penanganan selanjutnya sampah organik akan dikuburkan untuk mempercepat proses degradasi dan sampah anorganik akan dilakukan daur ulang.

Kegiatan kemah pendidikan lingkungan ini ditutup dengan inagurasi dan pemberian hadiah peserta terbaik. Adapun kriteria penilaian diantaranya: Kedisiplinan, team work, kekompakan, pengetahuan umum konservasi, dan kepedulian lingkungan. Adapun juara satu diraih oleh KP3 UGM, disusul BIONIC UNY, dan PELATUK UNNES. Kompetisi dalam hal ini memang perlu tetapi yang perlu digarisbawahi dari kegiatan ini adalah esensi atas kepekaan kita terhadap lingkungan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Wujud dari kepedulian terhadap lingkungan salah satunya dengan melakukan tindakan konservasi agar lingkungan tetap lestari sehingga mewujudkan keseimbangan yang akan berdampak positif terhadap kehidupan.

*) Tulisan ini telah dipublikasikan di media Lacakbalak FKT Universitas Gadjah Mada, redaksi Nautilus mendapat ijin dari penulis untuk dipublikasikan lagi pada majalah Nautilus edisi III tahun 2012.

SEKELUMIT CERITA DARI SEORANG PETUGAS LAPANGAN YANG DIPERBANTUKAN DI KANTOR

(By ; Nur Afendi, PEH)

Tulisan ini bisa dikatakan cerita atau mungkin juga bisa dikatakan unek-unek, tapi yang penting tujuannya adalah untuk membangun diri agar bisa lebih baik dan menyesuaikan diri di manapun tempat kita berada. Dimulai aja ya ceritanya.

Tahun 2008, saya selesai melanjutkan studi strata 1 di UNWIM, Sumedang, Jawa Barat, selepas kuliah saya langsung aktif kembali bekerja di Taman Nasional Karimunjawa. “Kamu bantu bikin renstra taman nasional dengan teman-teman yang baru selesai kuliah!”, perintah kepala balai saat itu. Duh..dalam batin sebetulnya pingin berontak, karena merasa pasti gak mampu, tapi pantang menolak tugas. Kami dalam satu tim akhirnya saling bahu membahu menyusun renstra. Satu tugas terlewati. Waktu terus berjalan rasa jenuh mulai hinggap dengan aktivitas keseharian di kantor, apel pagi jam 07.30 wib pulang jam 15.30, begitu terus sehari-harinya. Kejenuhan ini terjadi karena tugas rutin saya belum pasti, hanya bantu sana - sini, mana yang perlu tenaga untuk pekerjaan yang memang harus segera diselesaikan. Namun positifnya juga ada, pimpinan selalu memberikan nasihat dan

saran, pada intinya kita harus kreatif, apalagi sebagai petugas lapangan, ya ciptakan ide-ide untuk kegiatan dilapangan. Jangan monoton kegiatan itu-itu saja, gali potensi yang ada dilapangan, apa masalahnya, kumpulkan materinya, dan apa solusi dari masalah tersebut, itu yang diusulkan untuk jadi kegiatan, sehingga kegiatan benar-benar bisa menjawab masalah yang ada di lapangan.

Perlahan, seiring dengan pekerjaan keseharian saya, para pengambil kebijakan misalnya Koordinator program, KSBTU/PPK pada saat itu, kayanya tahu potensi yang bisa dikerjakan, akhirnya mulai diperbantukan di staf program khususnya administrasi pengadaan barang dan jasa. Pada bulan Mei 2009 saya mendapat perintah untuk mengikuti pelatihan Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa. Bulan Juni 2009, sebetulnya SK untuk kembali ke lapangan sudah turun,

dengan penempatan kembali di SPTN II. Karimunjawa. Pada saat akan berangkat ke lapangan, ternyata PPK saat itu memanggil untuk kembali ke kantor, dengan alasan karena saya telah lulus sertifikasi pengadaan barang dan jasa L2. “Terus apa hubungannya dengan itu Pak” tanyaku. “Kamu gak usah ke lapangan, tugasmu bantu pengadaan ya, SK untuk ke lapangan nanti di ganti lagi tidak apa-apa,” jelasnya singkat. Akhirnya mulai saat itu saya membantu pengadaan barang dan jasa dari segi administrasi. Tahun 2010, saya berpikir untuk ke lapangan saja, *toh* pekerjaan pengadaan di 2009 selesai tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tugas sebagai panitia pengadaan barang dan jasa di serahkan kepada penulis dalam bentuk surat keputusan kepala balai. Dengan belajar dari sana- sini, ada masalah bertanya, ada keraguan pelajari aturan, dan selalu koordinasi dengan instansi lain yang sudah lebih

maju dalam pengurusan pengadaan barang dan jasa, seperti BP DAS Pemali-Jratun dan Dinas Kehutanan Propinsi, *alhamdulillah* tugas tersebut bisa terlaksana dengan tuntas walaupun masih banyak yang perlu dibenahi lagi dari sisi administrasi maupun prosesnya.

Disini mulai timbul kebingungan dengan status saya sebagai pejabat fungsional pengendali ekosistem hutan (PEH), tetapi kerja di kantor. Saya berkonsultasi dengan pimpinan, bagaimana saya harus mengumpulkan angka kredit untuk

memenuhi syarat saya sebagai PEH. Saat itu saya baru merasa bagaimana seorang pimpinan tidak hanya sebagai komandan yang kerjanya perintah sana perintah sini, tapi juga sebagai seorang bapak yang menasihati anaknya. Dengan arahan dan nasihat itulah akhirnya penulis bersemangat lagi dalam bekerja.

Dengan selalu berdoa dan memohon petunjukNYA, dalam setiap pekerjaan dan langkah, insyaallah jalan terbaik selalu terbentang, untuk itu diperlukan kreatifitas dan ketekunan seorang pejabat fungsional

yang diperbantukan di kantor. Untuk itu buat teman-teman yang mempunyai tugas sama seperti penulis, jangan menyerah, jalan pasti ada, pekerjaan selesai, pangkat dan jabatanpun naik terus. Saat ini saya masih dipercaya untuk mengawal proses pengadaan barang dan jasa DIPA BA 29 Balai TN Karimunjawa. Dengan semangat kerja yang tinggi dan kadang harus lembur tiap malam (siap 24 jam) semoga semua anggaran yang harus melalui pengadaan dapat terserap dengan baik.

SALAM SUKSES untuk SEMUA!



MENUJU TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Oleh : Abdul Kodir (Auditor Muda pada Inspektorat II)

BPK RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan(WTP-DPP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan tahun 2011. Diharapkan sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara pada tahun 2012 akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini LK Kementerian Kehutanan Tahun 2011

Pada tanggal 6 Juni 2012 Menteri Kehutanantelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2011. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2011. Dengan opini tersebut, BPK menilai Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2011 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal yang menjadi Paragraf Penjelasan pada opini Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan Tahun 2011 adalah pada Piutang Bukan Pajak yang belum didukung dengan dokumen sumber senilai Rp23,428 Miliar, angka ini jauh berkurang dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp166,32 Miliar. Selain

menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Permasalahan yang menjadi paragraf penjelasan tentu saja merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi Kementerian Kehutanan untuk segera diselesaikan, disamping terus melakukan perbaikan serta menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti permasalahan SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diharapkan oleh BPK RI. Dengan pemberian opini WTP DPP ini, Kementerian Kehutanan diharapkan dapat terus membenahi sistem pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara sehingga dapat meningkatkan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini karena Laporan Keuangan yang berkualitas dihasilkan melalui sistem akuntansi yang andal (*reliable*) serta data yang dapat ditelusuri (*traceable*) dan layak diaudit (*auditable*). Namun demikian, perlu disadari bahwa opini laporan keuangan bukan

merupakan tujuan akhir tetapi merupakan sasaran antara menuju tertib administrasi pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.

Temuan BPK RI dalam LK Kementerian Kehutanan Tahun 2011

Untuk dapat menyelesaikan/meminimalisir permasalahan yang menjadi catatan BPK RI yaitu permasalahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, tentunya setiap satker dari tingkat manajemen maupun pada tingkat pelaksana harus mengetahui hal-hal apa saja yang merupakan kelemahan kita dan menjadi catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Dengan demikian, maka setiap satker dapat melakukan pembenahan sehingga sistem akuntansi yang ada menjadi andal serta data yang disajikan dapat ditelusuri. Temuan BPK RI tersebut secara ringkas dapat dirinci, sebagai berikut.

A. Temuan Terkait Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1. Pengendalian terhadap

pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PNBP pada Bendahara Penerima belum memadai.

2. Pengelompokan jenis/objek belanja pada saat penganggaran tidak sesuai kegiatan yang dilaksanakan, terjadi pada 18 satuan kerja pusat dan UPT.
3. Penyaluran dana pembuatan KBR kepada kelompok tani belum sesuai pedoman teknis KBR, dan pungutan pajak atas KBR belum diterapkan secara konsisten.
4. Pengelolaan belanja hibah luar negeri belum dilaksanakan dengan tertib (belanja yang bersumber dari hibah luar negeri)
5. Satker pada Ditjen BPDASPS melaksanakan kegiatan melampaui anggaran yang tersedia sebesar Rp3.304.046.338.
6. Pengelolaan dan penatausahaan kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu belum dilaksanakan dengan tertib. (t e l a h

dipertanggungjawabkan ke KPPN, tetapi bukti pengeluaran tidak ada).

7. Penatausahaan piutang bukan pajak belum memadai.
8. Sistem pengendalian pencatatan dan pelaporan persediaan per 31 Desember 2011 tidak tertib.
9. Pencatatan, penatausahaan, dan pengamanan aset tetap sptk erbelum memadai.

B. Temuan Terkait Ketidaktaatan pada Peraturan Perundang-Undangan

1. Dua puluh satu (21) pemegang Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) tidak menyampaikan laporan keuangan audited sebagai dasar pengenaan PNBP.
2. Kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa gaji, honor, dan uang makan pada 11 satker sebesar Rp521.378.381,00 (gaji ganda PNS yang diperbantukan pada lembaga internasional sebesar Rp485.748.131,00).
3. Penyelesaian pekerjaan

pengadaan barang dan jasa pada 20 satker mengalami keterlambatan, belum dikenai denda sebesar Rp 297.954.365,55.

4. Kelebihan pembayaran atas kegiatan pengadaan barang dan jasa senilai Rp1.920.426.880 pada 22 satker. (kekurangan spesifikasi terhadap kontrak/konstruksi).
5. Penghasilan yang berasal dari dana hibah belum dikenakan pajak.
6. Pertanggungjawaban pekerjaan swakelola sebesar Rp 739.066.200,00 tidak didukung bukti pengeluaran yang sah.
7. Terdapat kemahalan harga pada 7 satker senilai Rp 602.219.868,75
8. Kelebihan pembayaran kegiatan diklat wasganis PHPL PKBJ sebesar Rp 65.370.033,00
9. Biaya jasa konsultan pada 7 satker berpotensi merugikan Negara sebesar Rp 11.643.181.049,10 dan kelebihan pembayaran

sebesar Rp 2.541.115.643,69 serta potensi kehilangan aset sebesar Rp 56.605.000,00

10. Terdapat 32 satker melaksanakan kegiatan sebelum anggaran tersedia sebesar Rp12.565.120.000,00 (telah membuat perikatan dengan pihak III sebelum tersedia dana).
11. Pengenaan pajak untuk pengadaan kendaraan bermotor yang bersumber dari dana hibah luar negeri pada Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung tidak sesuai ketentuan.
12. Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan *tower repeater* di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tidak tertib.
13. Pengelolaan dan penatausahaan kas tidak tertib. (rekening liar belum ditutup, dan rekening dana hibah belum dilaporkan ke Menkeu).
14. Terdapat penyimpanan kas Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran

Pembantu, dan Pemegang Uang Muka pada rekening pribadi.

15. Aset tetap berupa tanah seluas 4.616.255,50 m² minimal senilai Rp 346.523.378.192,00 belum bersertifikat.
16. Penyerahan kendaraan bermotor roda 2 operasional penyuluhan kehutanan milik Sekretariat BP2SDMK kepada penerima hibah tidak sesuai tata cara pelaksanaan hibah BMN.(tidak didasari persetujuan hibah dari Menkeu).

Fokus audit BPK RI dalam pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga selama ini berfokus pada 6 hal, yaitu :

1. Aset
2. Persediaan
3. Perjalanan dinas
4. Pengadaan barang dan jasa
5. PNBP
6. Penyajian Laporan Keuangan

Temuan mengenai perjalanan dinas khususnya yang menggunakan pesawat udara

pada tahun sebelumnya menjadi temuan yang signifikan, pada pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 ini sudah sangat jauh berkurang, artinya secara bertahap pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan pesawat udara sudah m a m p u m e n u n j u k k a n pertanggungjawaban sesuai penggunaannya (*at cost*), diharapkan pada pemeriksaan laporan keuangan kementertian kehutanan tahun 2012 menjadi hal tersebut menjadi *zero* temuan.

Strategi Penyelesaian Masalah

Pencapaian opini WTP-DPP untuk LK Kementerian Kehutanan Tahun 2011 merupakan buah kerja keras seluruh jajaran di lingkup Kementerian Kehutanan, namun diharapkan kita jangan terlena dengan pencapaian saat ini, sebaliknya kita harus lebih focus menyelesaikan permasalahan yang diungkapkan oleh BPK RI. Permasalahan PNBP khususnya PSDH-DR tentunya merupakan tugas Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan untuk terus berupaya menyajikan data semaksimal mungkin (dokumen sumber)

sebagaimana diharapkan oleh BPK RI. Namun permasalahan Sistem Pengendalian Internal dan ketataan terhadap perundang-undangan masih banyak terjadi disetiap satker. Kebetulan saja pemeriksaan BPK sifatnya uji petik terhadap beberapa provinsi yang menjadi sampel. Andai saja pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh provinsi bukan tidak mungkin temuan-temuan BPK RI akan lebih banyak lagi.

Kita berharap pada LK Kementerian Kehutanan Tahun 2012 dapat memperoleh opini WTP, namun jika kita lengah bukan tidak mungkin opini yang diberikan akan menurun seperti yang terjadi pada kementerian lain. Hal ini perlu dipersiapkan oleh setiap satker, terutama bagi satker yang berada di provinsi yang belum pernah menjadi sampel uji petik pemeriksaan laporan keuangan, karena besar kemungkinan akan menjadi sampel uji petik BPK RI.

Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar temuan pada satker yang diperiksa oleh BPK RI dapat ditekan seminimal mungkin, diantaranya sebagai berikut :

1. Kenali permasalahan yang menjadi catatan oleh BPK RI,

sebagai bahan evaluasi pada satker masing-masing.

2. Pastikan bahwa pajak-pajak telah disetor dengan benar dan tertib sesuai peraturan yang berlaku.
3. Pastikan bahwa pengelolaan penerimaan negara bukan pajak telah tertib.
4. Pastikan tidak ada pembayaran ganda(*double account*).
5. P a s t i k a n b u k t i pertanggungjawaban perjalanan dinas telah lengkap dan benar, terutama tiket pesawat, boarding pas dan airport tax adalah asli dikeluarkan oleh maskapai penerbangan dengan jenis pesawat dan waktu penerbangan yang sesuai.
6. Lakukan pengujian kembali atas setiap bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan, jika terdapat kekurangan segera dilengkapi.
7. Pastikan cara penyusunan HPS telah benar, sehingga dapat diperoleh harga wajar
8. PPK agar mencermati proses pengadaan barang/jasa secara teliti.
9. Periksa hasil pengadaan apakah sudah sesuai spesifikasi dalam

kontrak, jika ditemukan ada yang tidak sesuai segera informasikan ke penyedia barang/jasa agar diperbaiki/dilengkapis sesuai kontrak.

10. Pastikan BMN (aset) hasil pengadaan maupun yang berasal dari transfer masuk dan hibah telah dicatat.
11. Lakukan evaluasi atas kondisi BMN, jika terdapat BMN yang rusak berat segera hentikan dari penggunaan dan segera usulan penghapusannya.
12. Pastikan BMN yang diadakan sesuai kebutuhan dan dimanfaatkan sesuai tujuannya.
13. Pastikan laporan-laporan kegiatan dan laporan perjalanan dinas telah dibuat secara lengkap
14. Tingkatkan peran sistem pengendalian internal.
15. Lakukan perbaikan atas temuan-temuan tim SPI.
16. Jika satker menjadi sampel BPK RI : tunjukkan orang yang memahami atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang sedang diperiksa oleh BPK RI, sehingga dapat memberikan penjelasan yang memadai atas suatu pekerjaan yang sedang diperiksa.

17. Segera komunikasikan permasalahan yang menjadi temuan BPK RI, terutama jika terjadi perbedaan persepsi.

Dengan upaya yang maksimal dari setiap Eselon I, termasuk didalamnya Inspektorat Jenderal yang memiliki kewajiban melakukan reuiu LK sebelum di periksa oleh BPK RI, diharapkan dapat memperoleh hasil yang optimal yaitu Opini WTP pada LK Kementerian Kehutanan Tahun 2012.

Sumber :

BPK RI 2012, LHP Kementerian Kehutanan Tahun 2011

Sudaryono, Ir, MM, 2012, Materi PKS Persiapan Reuiu LK

PENYU SISIK, DIISIK - ISIK, ASIK!

Oleh Susi Sumaryati

Pagi itu sudah terlihat sekelompok orang berkumpul di dekat dermaga. Tampak mereka sudah saling mengenal, terdengar dari perbincangan yang tampak akrab. Sesuai dengan rencana, kerumunan yang ternyata peserta Pembinaan Kelompok Pelestari Penyu itu

berkumpul di Dermaga Barat Karimunjawa untuk bersama-sama menuju ke Pulau menjangan Besar. M. Panji Kusumah, S.S dari Yayasan Hijau, yang hari itu akan memberikan materi selama sehari penuh sudah berada terlebih dahulu di Menjangan Besar untuk menyiapkan permainan

bagi peserta. Sesampai di Menjangan Besar, peserta menuju lokasi yang lapang di sekitar tempat Penetasan Semi Alami Penyu. Mas Panji, demikian panggilan akrabnya, membuka pagi itu dengan kata kunci : Bersama dan berbagi peran lestarikan penyu. Seharian itu, peserta diajak





untuk beraktifitas dalam bentuk permainan outbound. Lima macam permainan tersebut Polisi dan Pencuri, permainan ini dilakukan dalam satu kelompok besar dengan menggunakan alat bantu berupa hulahop dan sarung. Permainan kedua yang adalah hitungan ganjil, permainan ini dilakukan dalam satu kelompok besar, tidak memerlukan alat bantu, yang dibutuhkan adalah konsentrasi peserta. Peserta secara acak atas instruksi pemateri mulai menghitung dari angka 1, setiap

hitungan yang mengandung angka 3 dan 7 peserta tidak perlu menyebutkan, cukup dengan bertepuk tangan saja. Peserta yang salah akan mendapat hukuman sesuai dengan kesepakatan bersama.

Setelah berkumpul dalam satu kelompok, peserta dibagi menjadi dua kelompok, kelompok penyusuk dan kelompok penyusuk hijau. “Penyusuk Sisik!” seru ketua kelompok, “Diisik-isik..Asik!” sahut anggota kelompok dengan bersemangat. Berbalas yel-yel antar kelompok membuat acara

semakin meriah. Selanjutnya mereka menuju ke permainan *Spider web* tiap kelompok harus bisa melalui sebuah jaring yang diumpamakan jaring laba-laba. Anggota dalam kelompok harus melalui kotak jaring yang berbeda. Anggota kelompok harus saling membantu agar seluruh anggota dapat berpindah ke sisi lain dari jaring. Bentuk bantuan berupa kerjasama dengan saling menggendong atau bertumpu. Selepas bermain laba-laba, mereka bersiap lagi dengan permainan “teangan listrik”. Di

pantai sudah terpasang dua tonggak kayu dengan tali raffia yang diumpamakan sebagai kabel listrik. Masing – masing peserta dalam kelompok satu persatu harus bisa melewati tali tanpa boleh mengenai tali. Jika mengenai tali maka permainan harus diulang lagi dari awal. Pak Jumasah yang berbadan besar menjadi tumpuan bagi anggota kelompoknya untuk bisa melewati tali. “Waduh..punggunku sakit,” keluhnya dengan ekspresi meringis kesakitan, setelah semua anggota kelompoknya berhasil melewati tali. Berbeda dengan Mbah Kasih, peserta paling tua ini terlihat tak mau kalah dengan yang lain, “Sudah Mbah gak ikut permainan ini gak apa-apa,” kata Kuswadi, ketua pelaksana kegiatan itu. “Tenang Mas, aku sek kuat,” jawab Mbah Kasih sambil melepas sarung berganti dengan celana pendek.

Masih dalam suasana persaingan dua kelompok penyu sisik dan penyu hijau, kali ini mereka membuat lingkaran dengan menyatukan kaki untuk menyangga ember yang berisi air. Secara bergantian, peserta mengambil sandal yang sebelumnya dilepas

sedangkan peserta lain tetap dalam lingkaran untuk menyangga ember agar jangan sampai tumpah. Jika air dalam ember tumpah, maka permainan harus diulang. Kelompok penyu hijau tidak menyangga ember dengan baik, byurrrrrrrr.....ember berdiameter 50 cm yang penuh air itu jatuh membasahi tubuh mereka. “Ayo ambil air lagi Pak!” seru Mas Panji.

Setelah semua permainan selesai, mereka duduk dalam lingkaran tanpa alas, Panji Kusumah mulai menjelaskan makna dari aktifitas yang telah mereka lakukan seharian itu. “Jadi Bapak, Ibu, untuk melakukan penyelamatan penyu, kita harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lain, keterlibatan Bapak dan Ibu sekalian disini sangat dibutuhkan,” jelas Panji.

Penyampaian materi pada acara pembinaan ini dilakukan dengan kegiatan yang ringan, menyenangkan dan mudah dipahami, atau dengan kata lain, menggunakan cara yang partisipatif dan bahasa yang sesuai dengan jenjang pendidikan masyarakat yang tentunya berlainan latar belakang pendidikannya. Lebih

banyak praktek daripada teori. Sehingga masyarakat akan lebih mudah menangkap dan merasa dimanusiakan. Masyarakat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam konservasi penyu. Bentuk partisipasi yang mereka berikan disesuaikan dengan latar belakang mata pencaharian mereka selama ini. Nelayan memberikan partisipasinya dengan melaporkan keberadaan sarang dan penyu, sedangkan pengrajin dan pedagang memberikan partisipasi dengan tidak membuat dan menjual souvenir bagian tubuh penyu. Keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi selayaknya untuk dipertahankan.





@Pulau Burung

